

**PENGARUH DEWAN DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, KOMITE AUDIT
DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP OPINI AUDIT
ASUMSI GOING CONCERN**

Oleh:
Syarifah Siti Rabiah
Pembimbing: Kamaliah dan Alfiati Silfi

Faculty of Economics, Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail: syasira.alattas@gmail.com

*The Effect Of Board of Directors, Board of Commissioners, Audit Commite and
Institutional Ownership To The Opinion of Audit Assumption of Going Concern*

ABSTRACT

The main purpose of this research is examining and knowing the effects of board of directors, board of commissioners, audit committe and institusional ownership to the opinion of audit assumption of going concern. The population in this study were manufacture firm listing in Indonesia Stock Exchange period 2011-2013, with the population total 136 firms, the sample are taken using purposive sampling method, and there are 31 firm that fullfill the criteria. The data analysis technice which is used in this study is logistic regression. The result of this research show that board of commissioners and audit committe have effect on the opinion of audit assumption of going concern. Then, board of directors and institusional ownership does not have affect on the opinion of audit assumption of going concern.

Keywords : board of directors, board of commissioners, audit committe, institusional ownership, going concern opinion audit

PENDAHULUAN

Keadaan ekonomi yang tidak stabil di Indonesia sejak krisis keuangan berskala global memberi dampak tersendiri terhadap perusahaan yang ada. Hal ini mengakibatkan perekonomian Indonesia mengalami perubahan mendasar, terlebih pada saat krisis ekonomi terjadi, yang memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian, dan perusahaan-

perusahaan yang ada di Indonesia dari segala bidang. Krisis ekonomi membuat adanya persaingan antar perusahaan yang semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk dapat mengatur strategi perusahaan agar dapat bertahan dan berkembang lebih besar lagi, untuk itu perusahaan perlu membuat strategi yang tepat untuk mempertahankan kelangsungan usahanya(*going*

concern). *Going concern* merupakan salah satu asumsi yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan. Asumsi ini mengharuskan perusahaan memiliki kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya (*going concern*). Dengan adanya *going concern* maka suatu entitas (perusahaan) dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka waktu pendek. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP, 2004) maka dapat disimpulkan bahwa opini audit asumsi *going concern* merupakan opini yang diberikan oleh auditor untuk memastikan apakah perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya. Dewan Direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perseroan Terbatas (PT). Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perseroan terbatas. Dalam penelitian ini dewan direksi di proksikan pada kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah salah satu bentuk mekanisme *corporate governance* yang bisa menyamakan kepentingan pemilik dan pengelola perusahaan. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruance*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham (Faizal, 2004). Peningkatan persentase kepemilikan, akan membuat manajer termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan bertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Manajer tidak

hanya mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk memperoleh laba tetapi juga mengoptimalkan aktivitas investasi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Komisaris independen merupakan badan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan (Susiana dan Herawati, 2007). Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholder* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (*Forum for Corporate Governance in Indonesia*, 2001). Hasil penelitian Iskandar et al., (2011) dan Linoputri (2011) menyatakan proporsi dewan komisaris independen secara signifikan tidak berhubungan dengan masalah *going concern* (*going concern problems*), sehingga tidak berpengaruh terhadap pemberian opini audit *going concern* oleh auditor. Namun penelitian Petronila (2007) menyatakan keberadaan komisaris independen mempengaruhi auditor dalam pemberian opini audit

going concern dikarenakan keberadaan komisaris independen dapat menyalurkan proses pengambilan keputusan yang terkait dengan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*. Kemudian mekanisme *corporate governance* yaitu adanya kewajiban dibentuknya komite audit pada perusahaan-perusahaan public oleh Bursa Efek Indonesia dalam peraturan pencatatan efek no I-A, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) menunjukkan bahwa BEI ingin meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan sehingga dapat mengurangi aktivitas manajemen melalui *akruel diskresioner* Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite audit diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam pelaksanaan tugas yaitu mengawasi pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor untuk menilai perusahaan. Investor sebagai pihak luar perusahaan tidak dapat mengamati perusahaan secara langsung kualitas sistem informasi perusahaan sehingga persepsi mengenai kinerja komite audit akan mempengaruhi penilaian investor terhadap kualitas laba perusahaan. Pengawasan pada audit eksternal yang diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sehingga dapat memperbaiki efektivitas audit. McMullen (1996) dalam menunjukkan bahwa komite audit berhubungan dengan lebih sedikit tuntutan hukum pemegang saham

karena kecurangan dan tindakan illegal.

Kepemilikan instiusional berperan sebagai mekanisme pengendalian eksternal manajemen (Iskandar, 2011). Adanya pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, akan mendorong kinerja manajemen menjadi lebih baik atau sesuai yang diharapkan investor, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen (Setiawan, 2011). Dengan demikian masalah *going concern* perusahaan semakin kecil, sehingga berimplikasi terhadap kecilnya kemungkinan auditor memberikan opini audit asumsi *going concern* pada perusahaan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*? 2. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*? 3. Apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*? 4. Apakah kepemilikan instiusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*?

Sesuai dengan perumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :1. Untuk menguji dewan direksi terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. 2. Untuk menguji pengaruh dewan komisaris terhadap terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern* pada perusahaan manufaktur.

TELAAH PUSTAKA

Opini Audit Asumsi Going Concern

Terdapat lima jenis pendapat auditor menurut Mulyadi (2002) yaitu:

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)

Dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, auditor menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia.

2. Pendapat wajar tanpa pengecualian dengan bahasa penjas (*unqualified opinion with explanatory language*)

Dalam keadaan tertentu, auditor menambahkan suatu paragraf penjas atau bahasa penjas lain dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan auditan. Paragraf penjas dicantumkan setelah paragraf pendapat.

3. Pendapat wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*)

Pendapat wajar dengan pengecualian diberikan apabila auditee menyajikan secara wajar laporan keuangan, dalam semua hal yang material sesuai dengan prinsip akuntansi berterima secara umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal yang dikecualikan

5. Tidak memberikan pendapat (*disclaimer of opinion*)

Auditor menyatakan tidak memberikan pendapat jika ia tidak melaksanakan audit yang berlingkup memadai untuk memungkinkan auditor memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat ini juga diberikan apabila ia dalam kondisi

tidak independen dalam hubungannya dengan klien.

Going concern merupakan kelangsungan hidup suatu entitas, dengan adanya going concern maka suatu entitas dianggap akan mampu mempertahankan kegiatan usahanya dalam jangka panjang, tidak akan dilikuidasi dalam jangka pendek (Setyarno dkk, 2006). Jadi, ketika auditor memberikan opini dengan modifikasi mengenai going concern kepada auditee atas laporan keuangannya, itu merupakan suatu indikasi bahwa auditee berisiko tidak dapat bertahan dalam bisnis atau dengan kata lain, terdapat kesangsian mengenai kelangsungan hidup perusahaan.

Dewan Direksi

Wikipedia (2014), direktur (dalam jumlah jamak disebut dewan direksi) adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin Perusahaan. Direktur dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan.. Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Seorang direktur atau dewan direksi dalam jumlah direktur dalam suatu perusahaan (minimal satu), yang dapat dicalonkan sebagai direktur, dan cara pemilihan direktur ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan.

Dewan Komisaris

Dewan komisaris merupakan sekelompok orang dalam perusahaan yang diangkat dan diberhentikan

melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan petunjuk serta nasihat kepada manajemen dengan pengelolaan perusahaan. Oleh karena itu keberadaan dewan komisaris menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keberhasilan perusahaan. Selain itu keberadaan dewan komisaris akan menjadi penghubung bagi pemegang saham dalam mengetahui kondisi perusahaan yang dikelola oleh manajemen sehingga dewan komisaris. Proporsi dewan komisaris harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Menurut Peraturan Pencatatan Nomor IA tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat Ekuitas di Bursa yaitu jumlah komisaris independen minimum 30%. Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*), perusahaan wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah seluruh anggota komisaris. Secara umum dewan komisaris ditugaskan dan diberi tanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan.

Komite Audit

Komite Audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, *New*

York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan Komite Audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak Negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit apakah itu dalam bentuk *Code of Best Practices*, peraturan perundangan, maupun persyaratan pencatatan di bursa. Oleh karena itu dibentuklah komite audit yang merupakan komite khusus dalam perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan yang sebelumnya merupakan tanggungjawab penuh dari dewan komisaris (Wedari, 2004). Bapepam (2004) mendefinisikan komite audit sebagai berikut :

“Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris yang bertujuan untuk membantu dewan komisaris dalam rangka melakukan tugas dan fungsinya”

Sementara itu menurut Susiana dan Herawaty (2006), berkaitan dengan keberadaan komite audit, menjelaskan bahwa :

“Komite audit adalah suatu badan yang dibentuk di dalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen”.

Kepemilikan Instutisional

Menurut Beiner et al., (2003) kepemilikan instutisional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Dengan adanya kepemilikan instutisional seperti kepemilikan oleh perusahaan asuransi, bank, perusahaan-perusahaan investasi, dan kepemilikan oleh institusi-institusi lain dapat mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja manajemen perusahaan sehingga

akan menjamin peningkatan kemakmuran para pemegang saham.

Short dan Keasy (1999) dan Janurati (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan.

Pengaruh Kecerdasan Intelektual terhadap Kinerja Manajerial

Dunia kerja memiliki hubungan yang erat dengan kecerdasan intelektual yang dimiliki seseorang. Saat ini, dalam mencari karyawan yang baru banyak perusahaan akan melakukan tes IQ terhadap seseorang yang ingin memperoleh pekerjaan tersebut. Bahkan sebelum dapat mengikiti tes IQ, ada patokan IPK yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan menjadi penilaian layak atau tidaknya seseorang mendapatkan pekerjaan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual merupakan hal yang penting untuk di perhatikan. Eysenck berpendapat bahwa seseorang yang memiliki IQ yang tinggi akan lebih mudah menyerap ilmu yang diberikan sehingga kemampuannya dalam memecahkan masalah yang berkaitan dalam pekerjaannya akan lebih baik (dalam Trihandini).

Kecerdasan intelektual (IQ) berguna untuk memahami dunia dunia fisik dan membangun kekayaan materi (Agoes & Ardana, 2013). Hal ini berarti bahwa, dengan memiliki kecerdasan intelektual, seseorang dapat lebih mudah untuk memiliki pengetahuan tentang dunia secara fisik dan memiliki modal awal untuk mencapai kekayaan materi. Kecerdasan intelektual yang tinggi membuat seseorang akan mudah memahami ilmu pengetahuan yang

berkembang dari masa ke masa. Dengan demikian, orang tersebut mempunyai kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dipahami tersebut untuk mengumpulkan kekayaan materiilnya.

Penelitian pengaruh kecerdasan intelektual terhadap kinerja dilakukan juga oleh Pingkan Moniaga. Dimana hasil penelitian ini menyatakan bahwa memang kecerdasan intelektual memiliki pengaruh yang positif yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Pingkan juga mengambil kesimpulan dari penelitiannya ini, bahwa tingkat pengetahuan seseorang baik dilihat dari pendidikan maupun pengalaman kerja, akan mempengaruhi kinerja karyawan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang karyawan. Pingkan juga menyarankan, ada baiknya seorang karyawan dipilih dengan memperhatikan tingginya tingkat pendidikan seseorang dan kemampuannya untuk berpikir secara luas atas bidang yang digelutinya. Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kecerdasan intelektual berpengaruh terhadap kinerja

Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Opini Audit Asumsi Going Concern

Semakin besar saham yang dimiliki oleh manajemen, mereka akan bertindak lebih hati-hati dalam membuat keputusan dan berusaha mencegah perilaku oportunistik. Kecenderungan manajer sebagai pemilik dan pengelola perusahaan untuk tidak melakukan manajemen laba dan menghasilkan

informasi akuntansi yang credible demi reputasi perusahaan juga akan membawa pengaruh positif bagi pemberian opini auditor. Hasil penelitian Ballesta dan Garcia Meca (2005), di perusahaan-perusahaan non keuangan yang go public di Spanyol menunjukkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang lebih besar cenderung tidak menerima opini yang *qualified* (wajar dengan pengecualian). Linoputri (2010), menunjukkan bahwa dewan direksi yang memiliki saham di perusahaan, apalagi dalam jumlah besar cenderung berusaha mempertahankan atau bahkan meningkatkan fungsi pengelolaan dan pengawasannya terhadap perusahaan agar kinerja perusahaan juga dapat lebih baik dan dapat bertahan dalam jangka panjang. Selain itu juga untuk mencegah auditor meragukan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga tidak memberikan opini audit asumsi *going concern* pada laporan keuangannya.

H1 :Dewan direksi berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi going concern

Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*

Tugas komisaris independen dalam hubungannya dengan pelaporan keuangan adalah menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan serta mengawasi kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku. Mekanisme pengawasan yang dijalankan Dewan Komisaris akan berjalan lebih efektif jika lebih banyak anggota yang bersifat independen. Menurut

Amirudin (2004), keanggotaan komisaris independen harus lebih dari jumlah (30%), sehingga dapat *outvoted* dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, dengan adanya proporsi komisaris independen minimal 30% atau lebih banyak diharapkan dapat membawa pada pelaporan keuangan yang lebih berkualitas sehingga menghasilkan opini yang wajar tanpa pengecualian atau opini *non going concern*. Carcello and Neal (2000), menunjukkan peran komisaris independen dalam komite audit yaitu semakin besar persentase komisaris independen semakin rendah kemungkinan perusahaan menerima opini audit asumsi *going concern*.

H2 :Dewan komisaris berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi going concern

Pengaruh Komite Audit Terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan Dewan Komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian (Nasution dan Setiawan, 2007). Dalam rangka untuk membuat komite audit yang efektif dalam pengendalian dan pemantauan atas kegiatan pengelolaan perusahaan, komite audit harus memiliki anggota yang cukup untuk melaksanakan tanggungjawab. Di Indonesia, pedoman pembentukan komite audit yang efektif menjelaskan bahwa anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan sedikitnya terdiri dari 3 orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen terhadap perusahaan serta menguasai dan memiliki latar

belakang akuntansi dan keuangan.. Efektivitas komite audit akan meningkat jika ukuran komite meningkat, karena komite memiliki sumber daya yang lebih untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh perusahaan.

H3 : Komite audit berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi going concern.

Pengaruh Kepemilikan Instutisional Terhadap Opini Audit Asumsi Going Concern

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisir konflik keagenan yang terjadi antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan institusional memiliki arti penting dalam memonitor manajemen, karena dengan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal. Short dan Keasy (1999) dan Janurati (2009) menyatakan semakin besar kepemilikan institusional suatu perusahaan akan meningkatkan efisiensi pemakaian aktiva perusahaan. Dengan demikian, diharapkan adanya *monitoring* atas keputusan manajemen, sehingga mengurangi potensi kebangkrutan yang berimplikasi pada kecilnya kemungkinan pemberian opini audit asumsi *going concern* oleh auditor pada perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki hubungan yang berbanding terbalik dengan opini audit asumsi *going concern*. Semakin besar persentase kepemilikan institusional maka pengawasan investor institusional terhadap kinerja dan setiap keputusan yang diambil manajer pun semakin tinggi. Oleh karena itu, manajer akan meningkatkan kinerjanya agar sesuai dengan yang diharapkan pemegang saham dan dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan, sehingga kecil kemungkinan

auditor memberikan opini audit *going concern*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Iskandar et al., (2011) yang mengungkapkan kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan opini audit asumsi *going concern*

H4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi going concern

METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang bergerak dalam bidang manufaktur pada tahun 2011-2013. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 136.

Sampel penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*. Berdasarkan proses pemilihan tersebut, diperoleh 31 perusahaan yang dapat dijadikan sampel dengan periode pengamatan selama tiga tahun, sehingga total sampel adalah 93.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode *Content Analysis*, yaitu suatu metode pengumpulan data penelitian dengan menggunakan teknik observasi dan analisis terhadap isi atau pesan dari suatu dokumen. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu program aplikasi *Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Ver. 20*. Regresi logistik atau disebut juga dengan *binary logistic* merupakan model yang tepat digunakan untuk menganalisis data variabel kualitatif atau klasifikasi (Sulistyo, 2010:16).

Pada penelitian ini variabel yang akan diteliti adalah Opini Audit Asumsi *Going Concern*, Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional.

Variabel independen dalam penelitian ini adalah Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Kepemilikan Institusional. Sedangkan variabel dependen adalah Opini Audit Asumsi *Going Concern*.

Teknis Analisis Data

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengubah kumpulan data menjadi lebih mudah dipahami dalam bentuk informasi yang lebih ringkas.

b. Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan regresi logistik (*logistic regression*). Gujarati(2003) menyatakan bahwa regresi logistik mengabaikan *heteroscedasity*, artinya variabel dependen tidak memerlukan *Homoscedacity* untuk masing-masing variabel independennya. Model regresi logistik yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut :

$$\ln GC(1- GC) = \alpha + \beta_1 DD + \beta_2 DK + \beta_3 KA + \beta_4 KI + \varepsilon$$

Keterangan:

Ln= Dummy variabel opini audit (kategori 1 untuk auditee dengan opini audit asumsi *going cocern* dan 0 untuk auditee dengan opini audit *non going concern*)

DD = Dummy variabel dewan direksi (kategori 1 untuk auditee dengan adanya kepemilikan manajerial dan 0 untuk tidak adanya kepemilikan manajerial)

DK = Proporsi komisaris independen

KA = Jumlah seluruh anggota komite

KI = Kepemilika n Instutisional

α = Konstanta, 1,2,3= Koefisien

regresi logistik = Kesalahan residual

Menilai Model *Fit* dan Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai *overall fit* model terhadap data. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 Log Likelihood (-2LL) pada awal (*Block Number* = 0) dengan nilai -2 Log Likelihood (-2LL) pada akhir (*Block Number* = 1). Adanya pengurangan nilai antara -2LL awal (*initial -2LL function*) dengan nilai -2LL pada langkah berikutnya menunjukkan bahwa model yang dihipotesiskan fit dengan data (Ghozali, 2005). Log Likelihood pada regresi logistik mirip dengan pengertian *Sum of Square Error* pada model regresi, sehingga penurunan Log Likelihood menunjukkan model regresi yang semakin baik.

Menilai Kelayakan Model Regresi

Kelayakan model regresi dinilai dengan menggunakan Hosmer and Lemeshow's *Goodness of Fit Test*. Hipotesis untuk menilai kelayakan model regresi adalah:

H0: Tidak ada perbedaan antara model dengan data

Ha: Ada perbedaan antara model dengan data

Jika nilai statistik *Hosmer and Lemeshow Goodness of fit* lebih besar daripada 0,05 maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena sesuai dengan data observasinya (Ghozali, 2005).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna diantara beberapa atau semua variabel yang menjelaskan dari model regresi. Jika

variabel-variabel yang menjelaskan berkorelasi satu sama lain maka sangat sulit untuk memisahkan pengaruhnya masing-masing dan untuk mendapatkan penaksiran yang baik bagi koefisien-koefisien regresi, untuk mendeteksi ada atau tidaknya korelasi antar variabel atau multikolinieritas dalam penelitian ini, digunakan nilai pearson correlation. Jika koefisien korelasinya (r) $< 0,8$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabilitas variabel – variabel independen mampu memperjelas variabilitas variabel dependen. Koefisien determinasi pada regresi logistik dapat dilihat pada nilai *Nagelkerke R Square*. Nilai *Nagelkerke R Square* dapat diinterpretasikan seperti nilai *R Square* pada regresi berganda (Ghozali, 2005) Nilai ini didapat dengan cara membagi nilai *Cox & Snell R Square* dengan nilai maksimumnya.

Matriks Klasifikasi

Matriks klasifikasi akan menunjukkan kekuatan prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan penerimaan opini audit asumsi *Going concern* pada auditee. Angka ini dalam output regresi logistik, dapat dilihat pada *Classification Table*

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif Variabel

Dewan direksi memiliki nilai rasio terkecil adalah 0 yang menunjukkan nilai dewan direksi

terkecil dari seluruh sampel penelitian dan terbesarnya adalah 1. Nilai rata-rata sampel sebesar 0.7667 dan standar deviasi sebesar 0.42532. Nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata kepemilikan saham manajerial yang diteliti sebesar 0,77 % dan variasi yang terdapat dalam variabel ini sebesar 0,43.

Dewan komisaris memiliki nilai rasio terkecil adalah 20 dan terbesarnya adalah 50. Nilai rata-rata sampel sebesar 32,5713 dan standar deviasi sebesar 4,62106. Nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata anggota komisaris independen yang diteliti sebesar 32,57% dan variasi yang terdapat dalam variabel ini sebesar 4,62.

Komite audit memiliki nilai rasio terkecil adalah 2 dan terbesarnya adalah 5. Nilai rata-rata sampel sebesar 3,0556 dan standar deviasi sebesar 0,43346. Nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata anggota komite audit yang diteliti sebesar 3,06% dan variasi yang terdapat dalam variabel ini sebesar 0,43.

Kepemilikan institusional memiliki nilai rasio terkecil adalah 0.13 dan terbesar 91.94 yang mengindikasikan nilai kepemilikan institusional tertinggi dari seluruh sampel yang diteliti. Nilai rata-rata sampel sebesar 24,2488 dan standar deviasi sebesar 23,75035. Nilai ini mengindikasikan bahwa rata-rata saham kepemilikan institusional yang diteliti sebesar 24,25% dan variasi yang terdapat dalam variabel ini sebesar 23,75%.

Hasil Uji Keseluruhan Model (*Overall Model Fit*)

Analisis pertama yang dilakukan adalah menilai *overall fit* model terhadap data. nilai -2 Log

Likelihood pertama sebesar 26,306, angka ini secara matematik tidak signifikan pada alpha (@) 5% dan hipotesis nol diterima. Hal ini berarti bahwa hanya konstanta saja yang tidak fit dengan data (sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam model regresi).

Langkah selanjutnya adalah menguji keseluruhan model (*overall model fit*). Setelah keseluruhan variabel bebas dimasukkan ke dalam model, $-2 \text{ Log Likelihood}$ menunjukkan angka, 26,306 atau terjadi penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ sebesar 24,981. Penurunan nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ ini dapat diartikan bahwa penambahan variabel bebas ke dalam model dapat memperbaiki model fit serta menunjukkan model regresi yang lebih baik atau dengan kata lain model yang dihipotesiskan fit dengan data.

Hasil Uji Kelayakan Model Regresi

Dengan probabilitas signifikansi menunjukkan angka 0,520, nilai signifikansi yang diperoleh ini jauh lebih besar dari pada 0,05 (@) 5%, maka H_0 tidak dapat ditolak (diterima). Hal ini berarti model regresi layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya, karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati. Atau dapat dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

Hasil Uji koefisien Determinasi

Dilihat dari hasil output pengolahan data nilai *Nagelkerke R Square* adalah sebesar 0,358 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen adalah sebesar 35.80%,

sisanya sebesar dijelaskan oleh variabilitas variabel - variabel lain di luar model penelitian. Atau secara bersama-sama variasi variable dependen dapat menjelaskan variasi variabel Opini Audit asumsi *going concern* sebesar 35.80%.

Hasil Uji matrik Klasifikasi

Opini audit *non Going Concern* adalah 87. Jadi ketepatan model ini adalah 96.7%. Dan menurut prediksi, penerimaan Opini audit *Going Concern* adalah 3.

Pengujian Hipotesis

Dalam logistic regression ini, variabel dependen yaitu Opini Audit *Non Going Concern* diberi kode 0 yang menunjukkan bahwa Opini Audit asumsi *Going Concern* dan kode 1. dengan pengujian *multivariate* serentak ini nilai *p-value* untuk empat variabel berbeda secara signifikan. Untuk dewan direksi diperoleh nilai *p-value* $0.809 > 0.05$, kemudian Komisaris Independen sebesar $0.035 < 0.05$, Anggota Komite Audit sebesar $0.027 < 0.05$ dan kepemilikan institusional sebesar $0.738 > 0.05$.

Pembahasan

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Opini Audit (Hipotesis 1)

Nilai *p-value* variabel Dewan Direksi adalah sebesar 0,809 lebih besar dari 0,05 dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini ditolak artinya bahwa tidak terdapat pengaruh dari Dewan Direksi terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*. Artinya ada atau tidak dewan direksi tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*.

Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Opini Audit (Hipotesis2)

Nilai *p-value* variabel Dewan Direksi adalah sebesar 0,035 lebih kecil dari 0,05 dengan demikian hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima artinya bahwa terdapat pengaruh dari dewan komisaris terhadap praktik Opini Audit asumsi *going concern*. Artinya semakin tinggi jumlah anggota dewan komisaris semakin kecil penerimaan opini audit asumsi *going concern*.

Pengaruh Anggota Komite Audit terhadap Opini Audit (Hipotesis 3)

Nilai *p-value* anggota komite audit adalah 0,027 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima yang berarti bahwa terdapat pengaruh dari Anggota Komite Audit terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*. Artinya semakin tinggi jumlah anggota komite audit semakin kecil kemungkinan penerimaan opini audit asumsi *going concern*.

Pengaruh Kepemilikan institusional terhadap Opini Audit (Hipotesis 4)

Nilai *p-value* Kepemilikan institusional adalah 0,738 lebih besar dari 0,05. Dengan demikian hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak yang berarti bahwa tidak terdapat pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap Opini Audit asumsi *going concern*. Artinya ada atau tidaknya kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan opini audit asumsi *going concern*.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Tidak terdapat pengaruh dari Dewan Direksi terhadap Opini Audit

Asumsi *Going Concern*.

2. Terdapat pengaruh dari dewan komisaris terhadap praktik Opini Audit Asumsi *Going Concern*.

3. Terdapat pengaruh dari Anggota Komite Audit terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*.

4. Tidak terdapat pengaruh dari Kepemilikan Institusional terhadap Opini Audit Asumsi *Going Concern*.

Saran

1. Peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel perusahaan yang lebih banyak dan rentang waktu yang lebih lama agar diperoleh hasil pengujian yang lebih akurat.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan juga dapat menguji beberapa faktor lain, seperti kompensasi bonus, kontrak utang, faktor politik, pengurangan pajak, perubahan CEO, penawaran saham perdana (IPO) dan sebagainya

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Elqorni, 2009. Mengenal Teori Keagenan (All Management Insight). (elqorni wordpress diakses 26 Februari 2015).

Amirudin B. R., 2004. "Peran Komisaris Independen dalam Mewujudkan Good Corporate Governance di Tubuh Perusahaan Publik."

Beiner, S., Drobetz, W., et al, 2003, Is Board size an Independent Corporate Governance Mechanism.

Ballesta, Juan P. S. and E. Garcia-Meca, 2005. "Audit Qualifications and Corporate Governance in Spanish Listed

- Firms.*” Managerial Auditing Journal , Vol. 20, No. 7.
- Boediono, Gideon SB., 2005. “*Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur*”. Simposium Nasional Akuntansi VIII. Solo.
- Darmawati, Deni, Khomsiyah, dan R.K. Rahayu, 2004. “*Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan.*” Paper ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, 2-3 Desember 2004.
- Faizal, 2004. “*Analisis Agency Costs, Struktur Kepemilikan, dan Mekanisme Corporate Governance .*” Paper ini disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII , Denpasar, 2-3 Desember 2004.
- Firmansyah, R. Y., 2010. *Pengaruh Quick Ratio, Banking Ratio, ROA, CAR, Komite Audit, Prior Opinion, dan Kualitas Audit Terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern .* Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Surabaya
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. “*Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*”. <http://www.google.com>. Diakses pada 20 Mei 2014.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray dan Manson, 2000. *The Audit Process, Principles, Practice and Cases*. Second Edition. Thomson Learning.
- Hadiyana, Amalia. 2007. *Pengaruh Kondisi Keuangan Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Opini Audit Tahun Sebelumnya Terhadap Opini Audit Going Concern*. Skripsi . Program S1 Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya.
- Hartas M.H.R., 2001. “*Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan, Manajemen Laba, dan Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit Going Concern.*” Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herawaty, Vinola, 2008. “*Peran Corporate Governance sebagai Moderating Variable dari Pengaruh Earning Management terhadap Nilai Perusahaan.*” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* , Vol.10 No.2.
- Iskandar T.M., Mohd M.R., Norazura M. N., Norman M.S., dan Muhammad J.A.,

2011. “ Corporate Governance and Going Concern Problems: Evidence from Malaysia.” *International Journal Corporate Governance* Vol. 2 No. 2 pp.119-137
- Januarti,I., 2008. “*Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Auditor,Kepemilikan Perusahaan terhadap Penerimaan Opini Going Concern.*”Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Jensen, Michael C. dan William H. Meckling, 1976. “*Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure*”. *Journal of Financial Economics*, Vol.3 No. 4.
- Jimi Uji Wijayanto,Adi 2011. “*Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern(Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)*”
- Kaihatu, Thomas, 2006. “*Good Corporate Governance dan Penerapannya di Indonesia.*” *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol.8 No.1 Maret2006.
- Linoputri, F.P., 2010. *Pengaruh Corporate Governance Terhadap PenerimaanOpini Audit Going Concern* . Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.Semarang
- McMullen, D. A., Raghunandan, K., 1996. Enhancing audit committee effectiveness. *Journal of Accountancy* 182, 79-81.
- Midiastuty, Pratana P. dan Mas’ud Machfoedz. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate Governance dan Indikasi Manajemen Laba.*Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Mitton T, 2002. “A Cross –Firm Analysis of The Impact of Corporate Governance The East Asian Financial Crisis.” *Journal of Financial Economics*. Vol.20 pp. 293-315.
- Mulyadi, 2002. *Auditing, Buku Dua, Edisi Ke Enam, Salemba Empat, Jakarta*
- Nasution M.dan Doddy Setiawan, 2007. “*Pengaruh Corporate Governanceterhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia.*” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin,Makassar.
- Petronila, T.A., 2004. “*Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Opini Audit Going Concern.*” STIE STIKUBANK.
- Praptitorini, M. D. dan I. Januarti , 2007. “*Analisis Pengaruh Kualitas Audit, Debt Default, dan Opinion Shopping terhadap Penerimaan Opini GoingConcern*” Paper disajikan

- pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin.
- Ramadhany, A., 2004. “Analisis Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Opini Going Concern pada Perusahaan Manufaktur yang Mengalami Financial Distress di Bursa Efek Jakarta.”
- Santosa, Arga F. dan Linda K. Wedari, 2007. “Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kecenderungan Penerimaan Opini Audit Going Concern.” JAAI, Vol.11 No.3.
- Setiawan T.H., 2011. “Analisis Pengaruh Faktor Perusahaan, Kualitas Audit, dan Mekanisme Good Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern.”. Skripsi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Setyarno, Eko B., I. Januarti, dan Faisal, 2006. “Pengaruh Kualitas Audit, Kondisi Keuangan Perusahaan, Opini Audit Tahun Sebelumnya, Pertumbuhan Perusahaan terhadap Opini Going Concern.” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang
- Sheilfer J.A. dan Vishny R.W. 1997. “A Survey of Corporate Governance.” Journal of Finance Vol. 52 pp 737-783
- Short, H., and K. Keasey. 1999. Managerial Ownership and the Performance of Firms: Evidence from the UK. Journal of Corporate Finance 5, 79-101.
- Siallagan, Hamonangan dan Machfoedz, Mas’ud. 2006. *Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi IX .
- Sulistyo, Joko. 2010. *6 Hari Jago SPSS 17*. Cakrawala. Jakarta
- Susiana dan Arleen Herawaty. 2007. *Analisa Pengaruh Independensi, Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. SNA. X. Unhas Makasar. 26-28 Juli 2007.
- Ujiyantho, M. A. dan B. A. Pramuka, 2007. “*Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan*.” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Wedari, Linda K., 2004. “*Analisis Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris dan Keberadaan Komite Audit terhadap Aktivitas Manajemen Laba*.” Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar, Bali, 2-3 Desember 2004

